Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia

Pricillia Monique¹, Vita Amalia Puspamawarni²
Universitas Brawijaya

ABSTRACT

Human trafficking is a serious Transnational Organized Crime (TOC) faced by countries globally, including Indonesia and its neighbor, Malaysia. Both countries are categorized as tier 2 in the Palermo Protocol watchlist for their ineffective implementation of national laws and regulations to prevent or stop human trafficking. While Indonesia becomes the source country for human trafficking, Malaysia is the receiving country with the most Indonesian victims of human trafficking. There has been an increasing number of cases in 2014-2016. This paper aims to answer the main research question: what has caused the increase of human trafficking cases between Indonesia and Malaysia within this period? While internal factors from the source country influence human trafficking, external and personal factors contribute to the cases.

Keywords: Human Trafficking, TOC, Indonesia, Malaysia

PENDAHULUAN

Dari sekian banyak kejahatan transnasional, *human trafficking* merupakan salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi negara-negara serta masyarakat internasional. Perdagangan manusia termasuk dalam kejahatan transnasional karena aktivitas ini mampu melampaui batas-batas negara dan melibatkan satu negara dengan negara lainnya., sehingga menjadi salah satu keresahan terbesar bagi negara dan masyarakat internasional. (UNODC.org, n.d.). Timbulnya aktivitas perdagangan manusia dalam sebuah negara memiliki beberapa faktor, contohnya minimnya lapangan kerja, tingginya tingkat kemiskinan dalam negara tersebut, hingga kurangnya sosialisasi peranan gender.(Mehlman-Orozco, 2014).

Dalam menindaklanjuti permasalahan ini, sudah banyak upaya yang dilakukan oleh negara-negara, contohnya dengan membangun kerjasama bilateral hingga multilateral antar negara-negara di dalam satu Kawasan. Salah satunya adalah Bali Process yang merupakan forum pemberantas aktivitas perdagangan manusia yang dibentuk oleh Indonesia dan Australia dan terdiri dari setidaknya 43 negara anggota serta 3 organisasi internasional. Forum internasional yang dibentuk pada tahun 2002 ini dibentuk guna membangun tingkat kewaspadaan negara-negara terhadap aktivitas perdagangan manusia yang seringkali terjadi. (Process, n.d.). Selain itu, ada pula protokol yang dibentuk oleh United Nations yang menjadi dasar dari negara-negara dalam membuat hukum serta peraturan dalam upaya menanggulangi permasalahan human trafficking ini, yaitu protokol Palermo. Protokol ini terdiri dari protection, prosecution, and prevention. Maksud dari protokol ini adalah menjadi standarisasi untuk negara-negara dalam membuat peraturan serta hukum guna menanggulangi perdagangan manusia dalam suatu negara. (UNODC, 2004). Protokol pertama dari protokol Palermo ini adalah protection, yang berarti memberikan bantuan terhadap korban perdagangan manusia dengan menjaga identitas serta privasi dari korban perdagangan manusia di bawah hukum domestik yang berlaku. Setiap negara juga harus dapat

memastikan bahwa sistem administratif negara tersebut dapat menyediakan informasi kepada korban perdagangan manusia yang berkaitan dengan pengadilan yang relevan serta langkah administratif selanjutnya. Protokol selanjutnya adalah prevention, yang mengharuskan negara-negara untuk membuat kebijakan, serta program-program yang berkaitan dengan permasalahan ini, hal ini guna mencegah dan melawan aktivitas perdagangan manusia, juga untuk menjaga anak-anak serta kaum perempuan khususnya yang menjadi korban dari perdagangan manusia agar tidak lagi menjadi korban.

Protokol yang terakhir yaitu prosecution setiap negara diharuskan untuk mengadopsi legislatif untuk membuat peraturan serta hukum yang akan ditegakkan apabila terjadi pelanggaran yang disengaja. Hukuman harus dijatuhkan kepada setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perdagangan manusia.

Dalam protokol Palermo terdapat *tier* atau ranking yang membagi negara-negara menjadi 4 *tier* yang kategorisasinya berdasarkan efektivitas dari hukum atau peraturan yang ada sehubungan dengan perdagangan manusia yang ada dalam suatu negara. Dari pembagian 4 *tier* didapatkan bahwa *tier* 1 berisi negara yang kekuatan hukum serta peraturannya sudah bagus dan sesuai dengan standarisasi yang dijelaskan dalam protokol Palermo ini. Lalu, dalam *tier* 2 berisi negara yang hukum dan peraturan mengenai perdagangan manusia sudah masuk standarisasi yang ada dalam protokol Palermo, tetapi masih dibutuhkan perbaikan karena masih dianggap lemah dan tidak efektif. Sedangkan, dalam *tier* 2 watchlist, dijelaskan bahwa hukum serta peraturan mengenai perdagangan manusia yang ada dalam suatu negara belum memenuhi standarisasi minimum yang sudah ditetapkan dalam protokol Palermo serta jumlah aktivitas perdagangan manusia yang masih sangat tinggi terjadi di negara tersebut. Sehingga dibutuhkan peran lebih dari pemerintah negara dalam menanggulangi permasalahan perdagangan manusia. Yang terakhir ialah, *tier* 3, yang mana dalam *tier* ini, menjelaskan bahwa hukum serta peraturan yang berlaku dalam negara tersebut belum cukup kuat dan belum cukup efektif dalam menanggulangi permasalahan perdagangan manusia dalam suatu negara (STATE, 2017). Meskipun sudah ada peraturan dan hukum untuk menindaklanjuti permasalahan ini, masih banyak negara yang belum bisa menghentikan aktivitas ini, dikarenakan oknum- oknum yang terlibat dalam perdagangan manusia ini pun tidak hanya bertindak sebagai individu, namun merupakan sebuah kelompok maupun organisasi gelap dimana aktivitasnya sangat teratur dan terorganisir. Tidak sedikit negara-negara di Asia Tenggara yang menjadi penyumbang korban perdagangan manusia, contohnya Indonesia. Dalam protokol Palermo ini Indonesia menandatangani protokol tersebut pada 12 Desember 2000, namun baru meratifikasinya pada 28 September 2009. Semenjak menandatangani protokol Palermo ini, Indonesia sudah dimasukkan ke dalam *tier* 2. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang ikut terlibat dalam aktivitas perdagangan manusia, contohnya tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya lapangan pekerjaan, serta jumlah populasi yang tinggi (Naibaho, 2011). menjadi alasan mengapa banyak masyarakat Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia. Kasus perdagangan manusia di Indonesia umumnya terjadi pada kaum wanita, tetapi tidak sedikit juga melibatkan anak-anak. Kasus perdagangan manusia pun mengalami peningkatan drastis, dari 188 kasus di tahun 2013, lalu bertambah menjadi 326 kasus pada tahun 2014 dan bertambah lagi menjadi 548 kasus pada tahun 2015. (Gunawan & Ompusunggu, 2017)

Tentu saja banyak upaya Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia ini, contohnya dengan meratifikasi protokol Palermo, menjadi salah satu founders dari Bali Process, memiliki hubungan multilateral dengan Australia dan Filipina serta dengan banyak negara lainnya yang ikut tergabung dalam forum internasional tersebut guna menanggulangi permasalahan ini. Tidak hanya itu pada tahun 2007 pemerintah Indonesia membuat UU no. 21 tahun 2007, yang membahas mengenai pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang (TPPO), lalu di tahun selanjutnya pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan presiden no. 69 tahun 2008, yang membahas tentang pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hukum-hukum serta peraturan yang berkaitan dengan perdagangan manusia sudah dibuat, tetapi masih belum cukup efektif dan masih lemah dalam menumpas ataupun mengurangi permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Salah satu alasan mengapa Indonesia dari tahun 2012 hingga 2019 menduduki posisi *tier 2* dalam Trafficking in Persons Report adalah karena keberadaan kasus perdagangan manusia sendiri sudah melanggar hak asasi manusia

Gambar 1. *Ranking tier* Indonesia dari tahun ke tahun

Sumber : Trafficking in Persons Report (June 2019)

Banyak kaum wanita yang menjadi korban perdagangan manusia dikirim ke berbagai negara salah satu contohnya Malaysia, yang merupakan negara penerima perdagangan manusia dari Indonesia. Meskipun begitu Malaysia tidak luput dari kasus perdagangan manusia secara internasional maupun domestik, tidak sedikit juga kasus perdagangan manusia yang terjadi di Malaysia sendiri. Malaysia pun ikut meratifikasi protokol Palermo pada tanggal 26 Februari 2009 (United Nations, 2019) dan menempati *Tier 2* watch list, yang berarti peraturan serta regulasi mengenai perdagangan manusia sudah dibuat oleh pemerintah Malaysia namun masih sangat kurang efektif dan masih banyak peraturan juga regulasi yang belum memenuhi standarisasi minimum berdasarkan protokol Palermo. pada tahun 2015 melalui saran yang ada di dalam Trafficking in Persons Report Malaysia diharuskan untuk memberikan perlindungan yang lebih terhadap korban-korban dari perdagangan manusia dan juga diharapkan dapat memperkuat inspeksi-inspeksi buruh agar dapat mengidentifikasi aktivitas kerja paksa yang terjadi. Berikut merupakan ranking *tier* Malaysia dari tahun ke tahun;

Gambar 2. *Ranking tier* Malaysia dari tahun ke tahun

Sumber : Trafficking in Persons Report (June 2019)

Tidak hanya meratifikasi Protokol Palermo, Malaysia juga mengikuti Bali Process guna bekerjasama dengan negara lain dalam menghadapi isu yang sama (Suryanto, 2009).

Global Trafficking in Persons Report; East Asia and The Pacific mencatat bahwa pada tahun 2015 terdapat sekitar 305 orang yang menjadi korban perdagangan manusia yang terdeteksi, yang diantara 305 orang yang menjadi korban tersebut 281 orang diantaranya merupakan kaum wanita, 1 orang merupakan kaum pria, 19 orang anak perempuan dan 4 orang anak laki-laki. Namun jumlah tersebut meningkat secara drastis pada tahun 2016, yaitu sebanyak 676 korban, 569 orang merupakan kaum wanita, 83 orang kaum pria, 20 orang anak perempuan, dan 4 orang anak laki-laki. (Global Report on Trafficking in Persons, 201). Berikut merupakan data statistik korban-korban perdagangan manusia yang dideteksi dari tahun 2014 hingga 2017

Gambar 3. Data Korban Perdagangan Manusia dari 2014-2017

Sumber : East Asia and The Pacific Issue (2018)

Kasus perdagangan manusia di Malaysia pun jumlahnya tidak sedikit mulai dari yang domestik hingga yang internasional. Pada tahun 2015 hingga 2016 terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah korban perdagangan manusia yang terjadi dan peningkatan jumlah pelaku yang ditangkap oleh aparat pada tahun tersebut. Di negara Malaysia terdapat WNI yang menjadi korban perdagangan manusia dikarenakan Indonesia merupakan negara penyumbang korban perdagangan manusia terbesar di Malaysia selain Vietnam, menurut data yang diambil dari Global Trafficking in Persons Report; East Asia and the Pacific dari tahun 2014 hingga 2017 tercatat 475 orang korban memiliki kewarganegaraan Indonesia. Berikut merupakan Pie Chart jumlah korban perdagangan manusia di Malaysia menurut kewarganegaraan dari tahun 2014 hingga 2017: (Global Report on Trafficking in Persons, 2018)

Gambar 4. Jumlah Korban Perdagangan di Malaysia Menurut Kewarganegaraan

Sumber : East Asia and The Pacific Issue (2018)

Meskipun sudah banyak usaha dari pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan ini, aktivitas perdagangan manusia masih terus terjadi dan dengan jumlah yang tidak sedikit sehingga dapat dikatakan usaha yang dilakukan pemerintah kurang efektif dan hal ini menjadi isu yang menarik bagi penulis, sehingga penelitian ini akan meninjau lebih lanjut penyebab kenaikan kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia pada tahun 2015 hingga 2016 setelah banyak dari usaha yang dilakukan tidak berhasil.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penelitian yang membahas tentang Peningkatan Jumlah Kasus Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia pada Tahun 2014-2016, Studi terdahulu yang pertama yang diambil penulis untuk mendukung penelitian ini yaitu penulis menggunakan Jurnal milik Everd Scor Rider yang berjudul “Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur” yang ditulis pada tahun 2017. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa tidak sedikit kelompok buruh migran tersebut terdiri dari masyarakat NTT, yang mana pada tahun 2015 sekitar 941 orang TKW di berangkatkan dan selanjutnya pada tahun 2016 sekitar 726 orang. Para TKW ini dikirimkan ke banyak negara contohnya Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan dan Saudi Arabia. (Daniel, Mulyana, & Wibhawa, 2017)

Perdagangan manusia tidak memandang apakah negara tersebut merupakan negara maju atau berkembang, hal ini seperti apa yang ditulis oleh Capobianco dalam tesis *Theory of Human Trafficking Applied to Case of Japan*, ia menjelaskan mengenai bagaimana korban-korban yang terjatuh dalam aktivitas perdagangan manusia tidak dapat begitu saja pergi meninggalkan pekerjaan mereka, hal ini dikarenakan sistem yang di gunakan oleh oknum-oknum ini berupa hutang dengan biaya yang cukup tinggi. Korban-korban tersebut tidak dapat lepas dari pekerjaan mereka dikarenakan mereka diharuskan untuk melunaskan hutang-hutang tersebut kepada oknum yang terlibat.

PERDAGANGAN MANUSIA

Definisi dari perdagangan manusia menurut Kevin Bales yang masih berpacu pada definisi dari Human Trafficking yang dikeluarkan oleh The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, yaitu : Tindakan rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyimpanan, atau penerimaan orang yang dilakukan

dengan menggunakan ancaman atau kekerasan, penculikan kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, memberikan bayaran atau keuntungan kepada seseorang yang mengendalikan korban yang dilakukan dengan tujuan untuk eksploitasi, termasuk dengan prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau aktivitas lainnya, serta pengambilan organ tubuh. Dalam hal ini, persetujuan korban dianggap tidak relevan dimana terdapat cara-cara ilegal yang dipergunakan dalam aktivitas ini, tetapi pembelahan hukum pidana tetap dipertahankan. (Protocol Art. 3.b, Convention Article 11.6). Menurutny, akar dari permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di banyak negara di akibatkan oleh adanya keinginan dari oknum yang terlibat dalam kegiatan kejahatan transnasional ini, adanya tekanan ekonomi, ketidakstabilan dan masa transisi politik, dan faktor-faktor lainnya yang meliputi sosial budaya. (Bales, 2007).

Untuk menganalisis hal yang mendasari serta alasan tumbuhnya aktivitas perdagangan manusia, Bales dalam jurnalnya menggunakan dua variabel utama yakni *trafficking from a country* dan *trafficking to a country*. Kata *from* dan *to* merupakan penjelasan bahwa adanya faktor pendorong dan penarik dalam kasus *trafficking*.

Faktor-Faktor Pendorong

Kata 'from' yang berarti pendorong didefinisikan sebagai adanya perdagangan manusia dari negara asal. Faktor ini diartikan bahwa aktivitas perdagangan manusia berasal dari dalam hingga negara tersebut merupakan negara penyumbang perdagangan manusia.

Gambar 5. Faktor-Faktor Pendorong Perdagangan Manusia

Sumber: Kevin Bales, 2007

a. Korupsi

Kevin Bales menjelaskan bahwa tingkat aktivitas korupsi yang dilakukan oleh suatu negara penyumbang menjadi hal yang penting dalam aktivitas perdagangan manusia. Korupsi pemerintah yang dimaksud oleh Bales adalah adanya aktivitas suap-menyuap yang dilakukan oleh pelaku aktivitas perdagangan manusia kepada aparat pemerintah guna mempermudah aksinya. Dengan adanya pemerintahan yang korup dalam suatu negara maka hal ini akan menjadi akses keluar masuk bagi korban-korban perdagangan manusia, yang tentu saja mempermudah oknum atau pelaku yang terlibat untuk semakin leluasa melancarkan aktivitas perdagangan manusia dalam negara tersebut. (Capobianco, 2013). Ada atau tidaknya aktivitas korupsi oleh pemerintah Indonesia dengan menggunakan Corruption Perception Index

(CPI). Menurut CPI pada tahun 2014 Indonesia menduduki peringkat 107 dari 177 sedangkan Malaysia menduduki peringkat 51, hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat korupsi Malaysia.

b. Kemiskinan

Bales menyatakan bahwa tingkat kemiskinan dalam suatu negara dapat dilihat dari tingkat kematian bayi (infant mortality rate) dan produksi pangan (food production).

- Infant Mortality Rate (Tingkat Kematian Bayi)

Tingginya tingkat Kematian bayi menunjukkan buruknya kondisi ekonomi di negara tersebut. (Bales, 2007). Buruknya kondisi ekonomi ini yang merupakan salah satu penyebab mengapa banyak warga negara tersebut pindah ke negara lain yang mereka anggap dapat lebih menyejahterakan hidupnya hal ini juga yang menjadi faktor mengapa banyak dari mereka yang menjadi korban dari perdagangan manusia dengan tawaran yang dilihat lebih baik dan juga menarik dibandingkan dengan kondisi hidup mereka di negara tersebut. Tingkat kematian bayi di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 26,6 kematian per 1000 kelahiran, sedangkan Malaysia hanya mencapai 6,4 kematian per 1000 kelahiran.

- Food Production (Produksi pangan)

Jika suatu negara memiliki produksi pangan yang tinggi, maka negara tersebut dapat dikatakan memiliki kondisi ekonomi yang baik dan berada jauh dari kemiskinan dan kebutuhan pangan warganya terjamin. Dalam produksi pangan di tahun 2014, Indonesia berada di angka 140,39 sedangkan Malaysia berada di 129,21, namun produksi pangan ini bergantung pada luar wilayah negara tersebut.

c. Minimnya Kesempatan

Bales menjelaskan yang dimaksudkan dengan minimnya kesempatan ialah dalam mengakses pekerjaan. Persaingan yang sangat kompetitif dalam hal kesempatan pekerjaan apabila jumlah populasi dari negara tersebut yang berusia 18 tahun sangat besar (Bales, 2007). Hal ini juga menjadi alasan mengapa kesempatan pekerjaan yang tersedia tidak merata. Indikator yang digunakan Bales adalah dengan melihat jumlah populasi anak di bawah 16 tahun. Data yang digunakan berasal dari World Bank. Semakin tinggi jumlah populasi anak dibawah 16 tahun akan menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan dalam negara tersebut\

d. Kekacauan Sosial

Kerusuhan sosial mengganggu keamanan masyarakat. Keamanan yang tidak mampu dijamin oleh negara dapat menimbulkan warga negara tersebut memutuskan untuk pindah ke negara yang lain yang dirasa lebih aman dan nyaman, lagi-lagi hal ini menjadi sebuah kesempatan bagi para oknum yang terlibat dalam aktivitas perdagangan manusia. Faktor ini berbicara mengenai tingkat kerusuhan sosial yang terjadi dalam suatu negara dalam hal ini Indonesia dalam kurun waktu 2014-2016. Contohnya pada saat pemilu 2014, kerusuhan yang terjadi menimbulkan banyak korban baik dari pihak masyarakat hingga pihak aparat kepolisian. Tidak hanya itu di tahun 2015 pun banyak terjadi bencana-bencana alam yang membuat para warga tidak merasa aman dalam negaranya, menjadi alasan mengapa banyak warga yang berbondong-bondong bermigrasi ke negara lain.

e. Profil Demografi

Indikator ini berkaitan dengan sub-indikator atau penjelasan dari indikator-indikator sebelumnya yaitu tingkat kematian bayi, jumlah populasi, dan produksi pangan.

Faktor-Faktor Penarik

Terjadinya perdagangan manusia bukan hanya disebabkan oleh faktor pendorong dari negara pengirim, tetapi juga karena adanya faktor penarik dari negara tujuan. Faktor penarik ini pun memiliki indikator-indikator dalam menjelaskan munculnya perdagangan manusia ke dalam suatu negara yaitu: *governmental corruption* (korupsi yang dilakukan

pemerintah), *availability of employment* (ketersediaan lapangan kerja), dan *economic well-being* (kesejahteraan ekonomi). (Bales, 2007)

Indikator-indikator tersebut akhirnya diturunkan agar dapat lebih mudah diimplementasikan yaitu: the percentage of male population over the age of 60 (persentase dari populasi kaum pria diatas 60 tahun), level of governmental corruption (tingkat korupsi pemerintah), infant mortality (tingkat kematian bayi), food production (produksi pangan), serta energy consumption per capita (konsumsi energi per kapita) (Bales, 2007).

Gambar 6. Faktor-faktor Penarik Perdagangan Manusia

Sumber : Kevin Bales (2007)

a. Tingkat Korupsi

Faktor penarik yang pertama akan melihat tingkat korupsi yang terjadi di negara penerima, yaitu Malaysia. Governmental Corruption merupakan faktor utama yang mendukung akses kelompok kriminal untuk berkembang dalam negara tersebut. Tingkat korupsi dilihat dengan menggunakan Corruption Perception Index.

b. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja inilah yang diturunkan lagi oleh Kevin Bales menjadi sub-indikator percentage of male above age 60. Kurangnya usia produktif di suatu negara menyebabkan tingginya jumlah populasi pria berumur di atas 60 tahun yang masih bekerja, sehingga menyebabkan tidak terisinya lapangan pekerjaan berketerampilan rendah. Hal ini menjadi alasan menarik bagi para oknum perdagangan manusia untuk merekrut dengan menawarkan ketersediaan lapangan pekerjaan di negara tersebut kepada para korbannya. (Bales, 2007)

c. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi dalam suatu negara menurut Bales bergantung pada dua faktor, yaitu:

- Infant Mortality Rate (Tingkat Kematian Bayi)
semakin rendahnya tingkat kematian bayi dalam suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kesejahteraan ekonomi yang baik.
- Food Production (Produksi Pangan)
Tidak berbeda dengan penjelasan dalam faktor pendorong terjadinya perdagangan manusia, kesejahteraan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari produksi pangan dari negara tersebut.
- Energy Consumption Per Capita (Konsumsi Energi per Kapita)

Jika tingkat energi yang dikonsumsi sebuah negara semakin tinggi, maka semakin tinggi pembangunan negara tersebut. (Inaki Arto, 2016) Akan tetapi menurut Bales, indikator ini bukan faktor utama dari namun faktor ini, namun dapat menjadi pertimbangan kesejahteraan negara. (Bales, 2007)

d. Opportunity (Kesempatan)

Indikator ini menjelaskan tentang jumlah kesempatan pekerjaan berhubungan dengan jumlah pekerja produktif di dalam suatu negara penerima dari perdagangan manusia. Semakin rendahnya jumlah pekerja produktif negara tersebut maka akan memberi ruang bagi oknum untuk mempekerjakan korban perdagangan manusia.

e. Demographic Profile (Profil Demografis Negara Penerima)

Indikator ini menjelaskan mengenai kondisi dari negara penerima, dan berkaitan dengan sub-indikator dari indikator-indikator sebelumnya contohnya, jumlah populasi, produksi pangan, tingkat kematian bayi, dan konsumsi energi per kapita.

Untuk membahas tentang peningkatan jumlah kasus perdagangan manusia di Malaysia dari Indonesia pada tahun 2014 hingga 2016, penulis menggunakan metode eksplanatif kualitatif. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan segala informasi yang berhubungan dengan kasus apa yang menjadi fokus penelitian, dan mengumpulkan gejala yang ada dalam kasus yang dipilih pada penelitian ini. Penelitian ini tidak menguji hipotesis, tetapi lebih menekankan atas penggambaran mengapa hal tersebut bisa terjadi berdasarkan variabel dan indikator yang tersedia sesuai dengan konsep yang dipilih oleh penulis. Metode kualitatif berfungsi untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dan peneliti merupakan instrumen utama. Setidaknya, terdapat 5 jenis teknik pengumpulan data yang terdapat pada metode penelitian kualitatif, yaitu: (1) observasi terlihat;

(2) analisa percakapan; (3) analisa wacana; (4) analisa isi; dan (5) pengambilan data etnografis. (Somantri, 2005)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang membuat jumlah kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia meningkat pada tahun 2014-2016, dengan teknik analisis data secara induktif dengan tahapan studi Pustaka dan wawancara, Pengumpulan data, Kategorisasi data, Penyajian data, dan Pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari sekian banyaknya negara di Asia, Indonesia menjadi titik aktivitas untuk pengiriman dan transit perdagangan manusia baik tingkat lokal maupun internasional. Tidak sedikit warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia yang dikirimkan ke banyak negara, mulai dari Malaysia, Thailand, Singapura, Arab Saudi, Filipina, dan banyak negara lainnya, namun Malaysia merupakan negara penerima terbanyak korban perdagangan manusia dari Indonesia. (Global Report on Trafficking In Persons, 2018). Dari tahun 2013 hingga sekarang Indonesia menempati posisi *Tier* atau ranking 2 dalam Trafficking in Persons Report yang dibuat oleh UNODC berdasarkan protokol Palermo. Protokol ini juga menjelaskan adanya *tier-tier* atau *ranking-ranking*, dilihat dari kekuatan hukum serta peraturan yang berhubungan dengan perdagangan manusia yang ada dalam suatu negara. *Tier* (ranking) 1 mengartikan bahwa hukum serta peraturan dalam negara tersebut sudah bagus, dan telah sesuai dengan standarisasi yang dijelaskan dalam protokol Palermo. *Tier* 2 mengartikan bahwa dijelaskan bahwa hukum serta peraturan mengenai perdagangan manusia dalam negara tersebut sudah masuk dalam standarisasi yang ada dalam protokol Palermo, tetapi masih dianggap lemah dan belum efektif, sehingga masih perlu perbaikan. Berkebalikan dengan kedua *tier* sebelumnya, *tier* 2 watchlist menjelaskan bahwa hukum serta peraturan mengenai perdagangan manusia yang ada dalam suatu negara belum memenuhi standarisasi minimum

yang sudah ditetapkan dalam protokol Palermo serta jumlah aktivitas perdagangan manusia yang masih sangat tinggi terjadi di negara tersebut. Dalam hal ini jelas bahwa pemerintah dalam negara tersebut harus berperan lebih, dalam menanggulangi permasalahan human trafficking. Yang terakhir ialah, tier 3, yang mana dalam *tier* ini, menjelaskan bahwa hukum serta peraturan yang berlaku dalam negara tersebut belum cukup kuat dan belum cukup efektif dalam menanggulangi permasalahan perdagangan manusia dalam suatu negara. (U.S Department of State, 2017)

Banyak dari para korban perdagangan manusia ini dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial, serta pekerja paksa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah korban yang teridentifikasi dalam kasus perdagangan manusia pada tahun 2012 yang mana jumlah korban wanita berjumlah 120 orang dan korban pria berjumlah 103 orang. (U.S Department of State, 2017). Para korban perdagangan manusia tersebut ada yang diselundupkan melalui perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang dapat dikatakan sangat berdekatan, ada yang diberangkatkan menuju Malaysia dengan dalih dipekerjakan melalui sebuah agensi, dan tak jarang disebabkan keadaan ekonomi tidak mampu dan tidak sedikit pula di antara para korban tersebut menginginkan kehidupan yang lebih layak di negara tujuan (Rostanti, 2017), yang tentu saja di iming-imingkan oleh para oknum untuk dapat bekerja dengan upah yang besar dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Para korban yang terlibat perdagangan manusia ini berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, beberapa kota di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur serta Banten. (Global Report on Trafficking In Persons, 2018) Banyak dari korban perdagangan manusia tersebut merupakan orang-orang yang berasal dari desa-desa.

Secara geografis letak Indonesia dan Malaysia sangat berdekatan. Letak geografis yang berdekatan antara Indonesia dan Malaysia yang berdekatan menjadi poin tambahan bagi para oknum yang terlibat, hal ini dapat mempermudah akses keluar masuk para oknum yang terlibat.

Indonesia sendiri dalam permasalahan ini sudah melakukan banyak hal guna menanggulangi aktivitas terlarang ini. Mulai dari pembuatan undang-undang hingga peraturan serta hukum, tetapi tidak juga membuat aktivitas ini berkurang. Contohnya dengan meratifikasi protokol Palermo, menjadi salah satu founders dari Bali Process, memiliki hubungan multilateral dengan Australia dan Filipina serta dengan banyak negara lainnya yang ikut tergabung dalam forum internasional tersebut guna menanggulangi permasalahan ini. Dilanjut dengan membuat UU no. 21 tahun 2007 yang membahas mengenai pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pada tahun 2008 turut mengeluarkan yang membahas mengenai pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Hukum serta peraturan yang berkaitan dengan perdagangan manusia sudah dibuat tersebut masih belum cukup efektif dan masih lemah dalam menumpas ataupun mengurangi permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia dari tahun 2012 hingga 2019 menduduki posisi tier 2 dalam Trafficking in Persons Report. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia pada tahun 2013 terdapat sekitar 282 kasus yang teridentifikasi perdagangan manusia, lalu pada tahun 2014 menurun menjadi 138 kasus yang teridentifikasi. (Global Report Trafficking in Persons, 2016) Walaupun terjadi penurunan yang cukup signifikan hal ini bukan berarti semua kasus perdagangan manusia sudah teridentifikasi. Lalu, pada tahun 2013 terdapat sekitar 199 oknum perdagangan manusia yang diadili atas kesalahannya namun pada tahun 2014 jumlah tersebut menurun menjadi 150 orang. (Global Report Trafficking in Persons, 2016). Berikut merupakan jumlah oknum yang diadili dari tahun 2012 hingga Juni 2015.

Gambar 7. Jumlah oknum *human trafficking* yang diadili

Sumber : East Asia and The Pacific (2016)

Penurunan jumlah oknum yang di adili atas kasus perdagangan manusia bisa dikarenakan 2 hal, hukum serta peraturan yang ada berhasil dalam menanggulangi permasalahan perdagangan manusia ini atau oknum-oknum yang terlibat semakin lihai dalam menyembunyikan diri dan melanjutkan aktivitas terlarang tersebut dengan lebih berhati-hati.

Kasus perdagangan manusia dikategorikan ke dalam beberapa bentuk eksploitasi. Pada tahun 2012 terdapat 96 kasus yang teridentifikasi merupakan eksploitasi seksual, 3 kasus penjualan bayi yang baru lahir, dan 96 merupakan kasus kerja paksa (Global Report Trafficking in Persons, 2016) Berikut merupakan pie chart jumlah kasus perdagangan manusia berdasarkan tipe eksploitasi di Indonesia pada tahun 2012.

Gambar 8. Jumlah kasus perdagangan tipe eksploitasi di Indonesia tahun 2012

Sumber : East Asia and The Pacific (2016)

Alasan mengapa banyak negara belum bisa menghentikan aktivitas terlarang ini adalah karena oknum-oknum yang terlibat dalam perdagangan manusia ini pun tidak hanya bertindak sebagai individu namun merupakan sebuah kelompok ataupun organisasi gelap dimana aktivitasnya sangat teratur dan terorganisir.

Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Bales menyatakan bahwa tingkat kemiskinan dalam suatu negara dapat dilihat dari tingkat kematian bayi (infant mortality rate) dan produksi pangan (food production). Tingginya tingkat kematian bayi menunjukkan buruknya kondisi ekonomi di negara tersebut. (Bales, 2007) Salah satu faktor penentu kesejahteraan suatu negara juga dilihat dari produksi pangan negara tersebut. Jika negara tersebut memiliki produksi pangan yang tinggi maka negara tersebut dapat dikatakan memiliki kondisi ekonomi yang baik dan berada jauh dari kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu dari sekian isu yang ada dan dihadapi tidak hanya negara maju namun negara yang masih berkembang, tingkat kemiskinan suatu negara menjadi tolak ukur kekuatan ekonomi suatu negara. Karena apabila suatu negara memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi maka tingkat kemiskinan dalam negara tersebut tentu saja rendah, begitu juga sebaliknya. Bagi Indonesia kemiskinan masih menjadi tantangan yang sangat besar dan sulit untuk dihilangkan, hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan yang masih tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2013 pada bulan Maret persentase penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan berjumlah sekitar 11,36%, sedangkan di tahun 2014 pada bulan yang sama persentase penduduk miskin berubah menjadi 11,25%. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin berubah menjadi 11,22% lalu pada tahun 2016 persentase tersebut berubah menjadi 10,86% dan pada tahun 2017 persentase berubah menjadi 10,64% (BPS, 2019). Seperti yang dapat dilihat setiap tahunnya, walaupun terlihat menurun namun persentase tersebut tidak menjelaskan jumlah penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan jika di bandingkan dengan perubahan jumlah populasi di Indonesia dari tahun ke tahun.

Berikut merupakan data statistik jumlah dan persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun menurut Badan Pusat Statistik :

Gambar 9. Data Statistik Dan Jumlah Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Kembali pada faktor-faktor penentu tingkat kemiskinan menurut Bales. Tingkat kematian bayi di Indonesia masih sangat tinggi walaupun Indonesia bukan negara dengan angka kematian bayi terbanyak namun masih angka tersebut masih tinggi meskipun angka kematian bayi sudah menurun dari tahun ke tahunnya meski tetap dianggap dalam angka yang tinggi apabila melihat negara Asia Tenggara lainnya (Kumparan, 2018). Menurut data dari World Bank pada tahun 2014 sendiri angka kematian bayi mencapai 24,3 per 1000 kelahiran yang dianggap masih cukup tinggi, di tahun 2015 angka kematian bayi di Indonesia turun menjadi 23,5 dan pada tahun 2016 kembali menurun menjadi 22,6 per 1000 kelahiran (World Bank, n.d.) Beberapa hal memengaruhi angka kematian bayi di Indonesia misalnya, minimnya edukasi mengenai kehamilan khususnya pada masyarakat yang masih hidup dengan budaya pernikahan dini (Yuana, 2018). Dengan masih maraknya pernikahan sejak dini, ibu-ibu yang hamil tentu saja terlampaui cukup muda yang tentu saja meningkatkan resiko kesehatan bagi sang buah hati serta sang ibu. Budaya pernikahan dini di Indonesia masih sering terjadi hingga saat ini, hal ini dikarenakan kuatnya tradisi yang ada di dalam masyarakat.

Kemiskinan juga dilihat dari produksi pangan suatu negara, apabila suatu negara memiliki tingkat produksi pangan yang tinggi maka dapat dikatakan warga negara tersebut jauh dari garis kemiskinan karena kebutuhan pangan warga negara nya dapat terpenuhi.

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENARIK

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya peningkatan kasus Human Trafficking di Malaysia dari Indonesia tahun 2014 - 2016 dengan menggunakan “theory of human trafficking” dari Kevin Bales pada tahun 2007 yang dimana di dalam penulis dapat melakukan analisis mengenai faktor penyebab human trafficking di Malaysia dari Indonesia dengan menggunakan variabel dari teori tersebut yaitu trafficking from a country dan trafficking to a country. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, trafficking from a country berfokus pada negara asal dalam penelitian ini yaitu Indonesia sedangkan trafficking to a country berfokus pada negara tujuan yaitu Malaysia.

Faktor Pendorong

Dalam bukunya Bales menjelaskan mengenai adanya faktor pendorong atau Push-Factors adanya aktivitas human trafficking yang terjadi di suatu negara, yang menjadikan negara tersebut negara asal. Tentunya, suatu negara mempunyai suatu dorongan di dalam segala aspek baik dalam aspek ekonomi, keamanan, jaminan kesehatan yang layak dan perhatian khusus pemerintah kepada masyarakatnya. Kondisi negara lain yang dianggap lebih baik membuat masyarakat dari suatu negara tertentu berniat untuk melakukan perpindahan, demi mendapatkan apa yang diinginkan. 44 (Bales, 2007). Guna menganalisa lebih dalam faktor pendorong (Push-Factors) adanya peningkatan jumlah kasus human trafficking di Malaysia dari Indonesia pada tahun 2014 - 2016, maka Kevin Bales didalam bukunya yang berjudul “What Predicts Human Trafficking?” membagi menjadi beberapa faktor pendorong mengapa masyarakat berpindah dari Indonesia ke Malaysia, yang diantaranya:

Tingkat Korupsi Pemerintah

Korupsi pemerintahan suatu negara dapat menggambarkan situasi di dalam negara tersebut. Semakin besar tingkatan angka korupsi maka tingkatan negara tersebut di dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus human trafficking cenderung lemah, akibatnya aktivitas human trafficking pun sulit untuk ditangani karena adanya kerjasama antara aparat pemerintah dan para oknum human trafficking. Berikut merupakan data tingkatan serta skor korupsi Indonesia dari tahun 2014 – 2016

Gambar 10. Peringkat dan Skor Korupsi Indonesia tahun 2014-2016

Tahun	Peringkat	Skor	Total Negara
2014	107	34	174
2015	88	36	167
2016	90	37	176

Sumber : “Transparency International”, Corruption Perception Index

Berdasarkan data yang didapatkan melalui sumber Corruption Perception Index (CPI) di atas, Bisa disimpulkan bahwa Indonesia mengalami kemajuan di dalam memerangi kejahatan korupsi di negaranya untuk menegakan hukum, walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2016. Ini menandakan masih banyak upaya yang harus dilakukan Indonesia guna memperbaiki dan mengurangi tingkat korupsi di negaranya.

Jika di bandingkan dengan Malaysia tingkatan korupsi serta skor Malaysia lebih baik dari Indonesia, berdasarkan data dari Corruption Perception Index di tahun 2014 Malaysia menduduki peringkat 51 dari 174 negara dengan skor 52 (Transparency International, 2013). Lalu di tahun berikutnya yaitu 2015, Malaysia menduduki peringkat 54 (Transparency International, Exporting corruption: Progress report 2015: Assessing enforcement of OECD Anti-bribery Convention , 2015) dari 167 negara dengan skor 50,46, pada tahun 2016 peringkat Malaysia kembali menurun menjadi 55 dari 176 negara dengan skor 49. (Transparency International, Corruption Perceptions Index 2016 , 2017). Meskipun dari tahun 2014 hingga 2016 tingkatan korupsi serta skor Malaysia terus menurun, peringkat serta skor yang dimiliki Malaysia masih terlampau tinggi jika di bandingkan dengan Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa Malaysia melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menegakan hukum di permasalahan human trafficking yang terjadi di negara nya.

Korupsi di Indonesia sudah seperti cerita lama yang berulang kali diberikan dengan alur cerita dan plotting yang sama, keberadaan korupsi di Indonesia sudah sangat lama mulai dari orde lama hingga sekarang. (Wibowo, 2015) . Saat ini tidak hanya anggota pemerintahan yang ikut terlibat dalam kasus korupsi, melihat ke belakang sudah banyak kepala badan pemerintahan yang menjadi “contoh” bagi anggota-anggota lainnya untuk berlaku serupa. Bukan menjadi hal baru apa bila ditemukan banyak anggota serta kepala badan pemerintahan yang tertangkap tangan dalam kasus korupsi dan di masukan penjara atas kesalahannya. Tidak hanya karena dari sisi historis dari korupsi itu sendiri namun maraknya korupsi di Indonesia hingga saat ini dikarenakan jumlah koruptor yang masih sangat banyak dan terus bertambah (Dewi, 2018).

Alasan lain mengapa korupsi menjadi sesuatu hal yang masih sangat sering terjadi khususnya di Indonesia adalah oknum yang tertangkap selalu berusaha untuk melarikan diri ke luar negeri, hal ini guna mempersulit para aparat untuk menangkap oknum karena perbedaan negara. Untuk menghukum oknum tersebut harus dilakukannya ekstradisi dari negara dimana oknum tersebut melarikan diri ke Indonesia (detikNews, 2011) Meskipun jumlah anggota pemerintah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi sangat banyak dan permainan mereka yang lihai dan sangat licik, sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah

Indonesia dalam menanggulangi permasalahan korupsi di tanah air tercinta ini. Mulai dari pembuatan hukum serta peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, hingga pemerintah Indonesia membuat badan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Badan pemerintahan ini dibentuk oleh Presiden Megawati pada masa kepemimpinan beliau di tahun 2002 dan dibuat untuk menindak keras koruptor serta menghapus keberadaan korupsi (Sembiring, 2015). Akan tetapi meski pemerintah sudah melakukan berbagai macam cara untuk mengurangi angka korupsi di negara nya, masih banyak saja oknum-oknum tertentu yang melakukan tindakan korupsi secara diam-diam terutama di daerah-daerah yang minim pengawasan. Sehingga hal ini menjadi alasan masih banyaknya kasus human trafficking di suatu negara.

Tingkat Kemiskinan

Bales menyatakan bahwa tingkat kemiskinan dalam suatu negara dapat dilihat dari tingkat kematian bayi (infant mortality rate) dan produksi pangan (food production), dan kemiskinan menjadi salah satu faktor pendorong human trafficking.

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang tidak kunjung terselesaikan, ditambah lagi dengan jumlah populasi yang cukup tinggi serta pulau yang terpisah-pisah menjadi elemen kesulitan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Perlu upaya ekstra dari Indonesia untuk dapat mengeliminasi kemiskinan, dan menurut Bales untuk dapat mengeradikasi kemiskinan dari suatu negara maka negara tersebut harus dapat memperbaiki tingkat kematian bayi serta tingkat produksi pangan (Bales, 2007) begitu juga Indonesia.

Akan tetapi selain kemiskinan, ada alasan lain mengapa banyak warga Indonesia memilih untuk terlibat sebagai korban dalam perdagangan manusia, seperti para wanita yang menjadi korban ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta pemaksaan dari suami untuk melakukan pekerjaan ini. Alasan-alasan ini penulis dapat melalui hasil dari wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 31 Januari 2020 yang mana penulis mewawancarai seorang wanita dimana wanita tersebut pernah terlibat menjadi korban perdagangan manusia.

- Tingkat Kematian Bayi

Tingkat kematian bayi di Indonesia masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Berikut merupakan data dari World Bank mengenai angka kematian bayi di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2016

Gambar 11. Tabel angka kematian bayi di Indonesia dari tahun 2014-2016

Tahun	Angka kematian bayi / 1000 kelahiran
2014	24,3
2015	23,5
2016	22,6

Sumber : World Bank Mortality Rate, Infant (per, 1000 live births) – Indonesia

Meskipun menurut data dari World Bank menurun tiap tahunnya, namun penurunan tersebut masih harus berlanjut di karenakan Indonesia masih menjadi negara dengan angka kematian bayi terbanyak kedua se-Asia Tenggara (kumparan, 2018). Jika dibandingkan dengan Malaysia sebagai negara tujuan dari Human trafficking dari Indonesia maka data dari World Bank akan menunjukkan perbedaan yang sangat

signifikan di angka kematian bayi yang terjadi di Indonesia dengan yang terjadi di Malaysia. Angka kematian bayi di Malaysia jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka kematian bayi yang terjadi di Indonesia. Walaupun di setiap tahunnya angka kematian di kedua negara terus menurun namun perbedaan angka tersebut terlalu jauh. Malaysia di tahun 2009 hingga 2016 berhasil mempertahankan angka kematian bayi di 6,8 kematian di setiap 1000 kelahiran (World Bank) Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Malaysia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Banyak faktor-faktor yang terjadi dimana ini berdampak pada jumlah angka kematian bayi di Indonesia. Kentalnya tradisi daerah berdasarkan kultur dan budaya masing-masing tempat menjadi daya tarik tersendiri di mata internasional, namun hal ini dapat menjadi boomerang yang dapat menyerang balik Indonesia. Masih banyak budaya-budaya yang memperbolehkan pernikahan dini, yang tentu saja menjadi salah satu faktor masih tingginya angka kematian bayi di Indonesia (Yuana, 2018).

Dengan masih banyaknya pernikahan dini maka ibu-ibu hamil pun terlampaui masih sangat muda, hal ini tentu saja berdampak pada kesehatan kandungan. Hal ini dikarenakan kehamilan di usia dini menyebabkan banyak resiko kesehatan yang dapat terjadi pada buah hati serta sang ibu, contohnya sang buah hati dapat mengalami kelainan yang dapat mengancam keselamatan sang buah hati ataupun janin di dalam kandungan (Kusmiyati, 2013). Beberapa masalah Kesehatan lainnya, seperti: komplikasi saat kehamilan, tekanan darah tinggi saat hamil, pendarahan saat kehamilan lanjut, dan perdarahan pasca salin. Hal-hal inilah yang berdampak pada jumlah angka kematian bayi yang terjadi di Indonesia. Meskipun begitu pemerintah Indonesia melakukan banyak upaya guna mengurangi angka kematian bayi. Mulai dari memperbanyak serta memperluas jangkauan tenaga kesehatan ke daerah-daerah terpencil yang masih kurang tenaga medis, lalu ada pula upaya kelengkapan fasilitas kesehatan, stok obat yang diperbanyak, dan lebih sering melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai kehamilan (Prawira, 2014).

- Food Production Rate (Tingkat Produksi Pangan)

Tingkat kemiskinan suatu negara dapat dilihat dari tingkat produksi pangan dari suatu negara (Bales, 2007). Indonesia merupakan negara yang agraris serta memiliki kekayaan alam yang tinggi di tambah dengan letak geografis Indonesia yang dapat dikatakan sebagai letak yang strategis. Secara geografis Indonesia terletak pada daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi, hal ini membuat Indonesia sebagai tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Bukan hanya karena letak geografis Indonesia di sebut sebagai negara agraris namun, karena tidak sedikit penduduk warga negaranya mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian atau bercocok tanam.

Indonesia sebagai negara agraris memproduksi banyak hasil tumbuhan yang dijadikan hasil ekspor ke negara lain seperti padi, cabai, ubi, jagung dan sayur-mayur (Julianto, 2017). Tidak hanya itu namun Indonesia juga terkenal akan hasil kebunnya yang sangat variatif. Lebih daripada itu, Indonesia merupakan negara agraris yang mengimpor berbagai macam komoditas bahan pangan. (Kusuma, 2017). Indonesia banyak mengimpor bahan-bahan pangan dikarenakan hasil panen yang di dapat menurun.

Tidak hanya itu curah hujan yang tinggi saat musim hujan menjadi penyebab lain mengapa hasil produksi pangan menurun, dengan tingginya curah hujan maka tidak sedikit tanaman seperti padi, cabai, ubi, tebu, dan sayuran yang membusuk akibat kadar air yang terlalu tinggi, dan berakibat pada hasil panen yang berkurang. Tidak hanya pada saat musim hujan namun pada saat musim kemarau merupakan salah satu penyebab hasil

panen turun, karena saat musim kemarau kadar air yang ada dalam tanah berkurang dan sangat sulit tanaman untuk tumbuh. Hal lain yang menyebabkan hasil produksi pangan Indonesia menurun. Semakin berkembangnya era, semakin banyak pertumbuhan yang akan dilakukan suatu negara, mulai dari pertumbuhan infrastruktur hingga pembangunan gedung-gedung serta kompleks perumahan. Ini membuat lahan yang digunakan oleh para petani untuk bercocok tanam pun akhirnya berkurang sehingga banyak petani yang kesulitan dalam melakukan pekerjaannya. Berikut merupakan data dari World Bank mengenai produksi pangan Indonesia dari tahun 2013 hingga 2016.

Gambar 12. Tingkat Produksi Pangan Indonesia dari tahun 2013 - 2016

Sumber : Indonesia Food Production Index, World Bank.

Menurut data milik World Bank tersebut (World Bank, Food Production Index (2004-2006=100)), jika dibandingkan dengan Malaysia, tingkat produksi pangan Indonesia lebih tinggi dan memang seharusnya produksi pangan Indonesia lebih tinggi dari Malaysia. ini dikarenakan jumlah populasi Indonesia yang lebih dari Malaysia, juga luas wilayah Indonesia yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Malaysia. 1,905 juta km² merupakan luas wilayah Indonesia (Kusnandar, 2019), sedangkan negara dengan luas wilayah 329,847 km² ialah Malaysia. Namun perbedaan dalam produksi pangan antar Indonesia dengan Malaysia tidak terlalu jauh, yang dimana seharusnya perbedaan tersebut sangat jauh mengingat luas wilayah antar dua negara tersebut terlampaui sangat jauh.

Minimnya Kesempatan

Kesempatan yang dimaksud ialah kesempatan dalam mengakses pekerjaan. Bales menurunkan variabel ini dengan melihat jumlah populasi yang berusia dibawah 14 tahun dalam suatu negara. Bales menjelaskan bahwa dengan tingginya populasi yang berusia 14 tahun di suatu negara maka akan ada kompetisi atau persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak khususnya di wilayah ASEAN, jumlah penduduk Indonesia mencapai 261 juta jiwa, sedangkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Filipina yang berpenduduk 103 juta jiwa dan Vietnam berpenduduk 92 juta jiwa (ASEAN-Indonesia, n.d.). Dengan tingginya jumlah penduduk Indonesia tentu saja tidak sedikit penduduk yang berusia 14 tahun kebawah, sehingga membuat terjadinya persaingan di dalam lapangan pekerjaan. mereka harus bersaing

dengan anak seumur dengan mereka, adu kepintaran, adu poin-poin plus dengan anak-anak yang lainnya. Dengan harapan mereka bisa memperoleh pekerjaan, menurut data dari World Bank sendiri jumlah penduduk Indonesia berusia di bawah 14 tahun cukup tinggi, dari tahun 2014 hingga 2016 terjadi penurunan terhadap jumlah penduduk yang berusia 18 tahun kebawah. Akan tetapi, meskipun terjadi penurunan jumlah populasi di bawah umur 14 tahun di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah populasi di bawah umur 14 tahun di Malaysia. Sehingga dapat dikatakan bahwa persaingan dalam mendapatkan pekerjaan di Indonesia lebih sulit jika dibandingkan dengan persaingan pekerjaan di Malaysia. Keterbatasan lapangan pekerjaan ini yang membuat banyak warga negara Indonesia menjadi pengangguran, dan kesulitan mendapatkan pekerjaan, jumlah pengangguran juga yang tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada. Berikut merupakan data dari World Bank mengenai jumlah populasi di bawah umur 14 tahun di Indonesia,

Gambar 13. Persentase dari penduduk Indonesia dan Malaysia berumur 0-14
tahun 2014 - 2016

Sumber : World Bank Population Ages 0-14, Indonesia and Malaysia

Data atas menunjukkan perbedaan persentase jumlah populasi berumur 14 tahun kebawah dari Indonesia dan Malaysia dari tahun 2014 hingga 2016. Dimana data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk berumur dibawah 14 tahun di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia.

- **Population Pressure (Tekanan Populasi)**

Dengan luas wilayah 1,902 juta km² daratan Indonesia, mampu menampung 261 juta jiwa yang tentu mana bukanlah jumlah penduduk yang sedikit. Populasi Indonesia juga tidak tersebar secara merata mulai dari Sabang hingga Merauke, populasi Indonesia sangatlah berpusat pada Jawa Sentris, dimana pulau Jawa di tempati banyak warga Indonesia. Sehingga populasi pun lebih dikonsentrasikan di pulau tersebut dibandingkan pulau lainnya, namun bukan berarti pulau lainnya tidak berpenghuni.

Dengan jumlah populasi yang terus meningkat tiap tahunnya menjadi problema tersendiri bagi suatu negara, mulai dari ketersediaan bahan pangan dari pemerintah, ketersediaan lahan untuk tinggal, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan masalah lain-lain (INVESTMENTS, 2017). Kesejahteraan masyarakat itu merupakan tanggung jawab negara tersebut untuk dapat menyediakan lahan untuk dijadikan tempat tinggal, menyediakan lapangan pekerjaan, serta memenuhi kebutuhan pangan di pasar. Namun

dengan populasi yang begitu banyaknya negara pun harus melakukan pekerjaan yang lebih untuk dapat memenuhi setiap kebutuhan warganya di dalam masyarakat dengan tingginya jumlah populasi tentu akan ada persaingan antar warga dalam hal pekerjaan, tempat tinggal, pasar dan lain-lain. Berikut merupakan data dari World Bank mengenai pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 2014 hingga 2016.

Gambar 14. Pertumbuhan Populasi Indonesia dari tahun 2014 - 2016

Sumber : World Bank, Population Growth – Indonesia

Menurut data diatas pertumbuhan populasi Indonesia mencapai yang semula pada tahun 2014 mencapai 1,311% menurun hingga hingga tahun 2016 yang mana menjadi 1,22% (World Bank, Population growth (annual %) - Indonesia). Meskipun menurun namun pertumbuhan tersebut masih sangat tinggi. Sedangkan pertumbuhan populasi Malaysia di tahun 2014 mencapai 1,34%, hingga 2016 pertumbuhan populasi Malaysia lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini akan terlihat bahwa Malaysia memiliki pertumbuhan populasi yang tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia secara umumnya, namun perlu diingat bahwa jumlah tersebut harus dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing negara. Seperti yang sudah dijelaskan pada indikator sebelumnya bahwa luas wilayah Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan luas wilayah Malaysia, sehingga meskipun pertumbuhan populasi Malaysia lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan populasi Indonesia namun dengan luas wilayah Indonesia yang sangat besar maka pertumbuhan populasi Indonesia lebih besar.

Populasi Indonesia sangatlah Jawa sentris dimana, pulau Jawa menjadi pusat hunian warga, karena ini banyak warga yang menjadi pengangguran, tidak memiliki tempat tinggal, kemacetan, peningkatan angka kriminalitas dan hal inilah yang membuat penyebaran penduduk tidak merata (INVESTMENTS, 2017). Pertumbuhan populasi yang tinggi di Indonesia dapat disebabkan beberapa hal, mulai dari banyaknya keluarga yang tidak mengikuti program keluarga berencana sehingga satu keluarga memiliki anak lebih dari dua, angka kelahiran jauh lebih tinggi dibandingkan angka kematian. Sehingga angka penduduk pun terus menumpuk dan bertambah dna jumlah populasi pun semakin meningkat.

Kekacauan Sosial

Konflik serta kerusakan sosial bukan lagi menjadi hal yang asing bagi Indonesia,

banyak kerusuhan serta konflik sosial yang sering terjadi di Indonesia yang tentu saja mengikutsertakan banyak pihak dan golongan masyarakat. Mulai dari masyarakat berdemo di jalanan untuk menyuarakan keinginannya hingga aksi siswa tawuran antar sekolah yang hingga saat ini masih sering terjadi (Saifullah, 2014). Tawuran menjadi ajang dimana siswa-siswa sekolah menunjukkan kebolehan serta ketangkasan sekolahnya dalam beradu tinju. Dimana tidak jarang dalam aksi tawuran ini menimbulkan korban jiwa tidak hanya dari siswa-siswa tersebut namun dari masyarakat sekitar yang tidak tahu menahu namun menjadi korban jiwa dalam aksi tersebut (Felisiani, 2014). Aksi-aksi tersebut dapat memakan korban jiwa dan tentu dapat membuat resah masyarakat sekitar sehingga masyarakat pun merasa tidak aman. (Malau, 2015). Banyaknya kerusuhan sosial ini membuat Indonesia dilihat sebagai negara yang tidak dapat mendisiplinkan masyarakatnya agar dapat melakukan aksi demo dengan aman serta tentram dan tidak menimbulkan ancaman-ancaman bagi masyarakat yang lain. Meskipun sudah dihimbau untuk melakukan aksi demo dengan tertib dan teratur namun masih banyak orang yang ikut menyuarakan kritikan dan keinginannya dengan cara melakukan kekerasan.

Tidak hanya konflik antar suku, golongan, ras dan agama yang masih sering terjadi, konflik antar instansi pemerintahan pun kerap kali berkonflik. Contohnya TNI-POLRI yang pada tahun 2014 sendiri terjadi sekitar 7 kali bentrokan antar anggota TNI dan POLRI (Faqih, 2014), konflik memang tidak bisa dihentikan namun hal tersebut akan menjadi sebuah pertanyaan besar bila aparaturnya pun ikut terlibat yang mana seharusnya dapat memberikan contoh yang baik.

Kekerasan dalam keluarga juga menjadi alasan mengapa seseorang menjadi merasa tidak aman. Fakta ini penulis dapati saat melakukan wawancara kepada seorang wanita pada tanggal 31 Januari 2020. Kekerasan secara fisik dan verbal menjadi makanan sehari-hari wanita tersebut, setiap ayunan tangan serta kata-kata kasar yang dilontarkan suami juga kondisi ekonomi yang kian memburuk akibat ulah suami yang gemar berjudi. Memaksa wanita ini untuk mencari pekerjaan guna membayar hutang-hutang yang ditinggal sang suami.

FAKTOR PENARIK MIGRASI

Dalam bukunya Bales, terdapat faktor pendorong dan faktor penarik dalam aktivitas human trafficking yang mana faktor pendorong melihat dari faktor yang ada di negara asal sedangkan faktor penarik berasal dari negara tujuan. Tentunya, suatu negara mempunyai suatu dorongan di dalam segala aspek baik dalam aspek ekonomi, keamanan, jaminan kesehatan yang layak dan perhatian khusus pemerintah kepada masyarakatnya. Dorongan tersebut juga yang menjadi penarik bagi masyarakat yang tinggal di suatu negara untuk ikut terlibat dalam aktivitas terlarang tersebut. Kondisi negara lain yang dianggap lebih baik membuat masyarakat dari suatu negara tertentu berniat untuk melakukan perpindahan, demi mendapatkan apa yang diinginkan (Bales, 2007). Namun, perpindahan dari satu negara ke negara lain memberikan dampak yang tidak baik juga akibatnya meningkatnya perpindahan masyarakat yang menekuni profesi ilegal yang berkaitan dengan human trafficking karena mendapatkan jaminan kehidupan yang layak dari suatu oknum tertentu

Beberapa faktor penarik mengapa masyarakat berpindah dari Indonesia ke Malaysia, Guna menganalisa lebih dalam faktor penarik (Pull-Factors) adanya peningkatan jumlah kasus human trafficking di Malaysia dari Indonesia pada tahun 2014 – 2016 menurut Kevin Bales, diantaranya:

Tingkat Korupsi

Indikator **Government Corruption** dalam variable *Trafficking To a Country* berarti melihat tingkat korupsi pemerintah negara asal korban human trafficking. Bales menjelaskan

dalam bukunya bahwa semakin besar tingkatan angka korupsi maka tingkatan negara tersebut di dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus human trafficking pun sulit untuk ditangani karena adanya kerjasama antar aparat pemerintah dan para oknum human trafficking.

Tingkat korupsi pemerintah suatu negara juga melihat tingkat kasus suap menyuap antar aparat pemerintah dan juga dengan oknum yang berkaitan dengan kasus perdagangan manusia. Tingginya tingkat korupsi pemerintah menjadi celah yang mudah untuk digunakan oleh para oknum untuk memperlancar aksinya, karena dengan membayar aparat pemerintah yang terlibat maka para oknum dapat melanjutkan aksi ilegalnya tersebut. Berikut merupakan data tingkatan serta skor korupsi pemerintah Malaysia dari tahun 2014-2016.

Gambar 15. Tingkatan dan Skor Korupsi Malaysia dari tahun 2014-2016

Tahun	Peringkat	Skor	Total Negara
2014	51	52	174
2015	54	50	167
2016	55	49	176

Sumber : “Transparency International”, Corruption Perception Index

Jika dilihat perbedaan skor serta peringkat korupsi pemerintah Malaysia dan Indonesia, maka dapat dilihat bahwa skor dan peringkat korupsi pemerintah Malaysia masih cukup baik dibandingkan pemerintah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia lebih rentan terhadap aktivitas korupsi dibandingkan dengan Malaysia. Aktivitas suap menyuap serta korupsi yang kerap terjadi di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia juga menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh para oknum yang terlibat dalam melancarkan aksinya (Putra, 2016)

Meskipun begitu penulis tidak melihat adanya korelasi yang lebih dari tingkat korupsi pemerintah Malaysia dengan meningkatnya jumlah kasus perdagangan manusia dari Indonesia yang terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap salah seorang yang pernah menjadi korban perdagangan manusia dari Indonesia dari Malaysia. Hasil wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa faktor lain yang menjadi faktor yang mengakibatkan meningkatnya jumlah kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia ialah, adanya unsur-unsur yang datangnya dari keluarga korban, contohnya adanya kekerasan dalam rumah tangga yang memaksa para korban khususnya wanita untuk mencari “pelarian” guna terlepas dari kondisi lingkungan yang berbahaya.

Ketersediaan Pekerjaan

Indikator ini menjadi salah satu faktor yang menarik bagi para oknum untuk ditawarkan kepada para korban yang melihat hal ini sebagai kesempatan yang baik guna mendapatkan kesempatan kerja dan kehidupan yang lebih layak. Indikator ini melihat jumlah populasi pria di atas umur 60 tahun yang masih bekerja pada negara penerima, dengan tingginya jumlah populasi pria yang berumur di atas 60 tahun yang masih bekerja maka pekerjaan yang berketerampilan rendah menjadi kosong (Bales, 2007)..Hal inilah yang menjadi alasan menarik bagi para korban untuk ikut terlibat dalam aktivitas perdagangan manusia. Berikut merupakan sajian data mengenai persentase populasi pria diatas umur 60 tahun yang penulis dapatkan melalui World Bank antara Indonesia sebagai negara

pengirim/penyumbang dan Malaysia sebagai negara penerima/tujuan.

Gambar 16. Persentase populasi pria di atas 60 tahun

Tahun	Persentase Populasi Berumur diatas 65 tahun / jumlah populasi (Indonesia)	Persentase Populasi Berumur diatas 65 tahun / jumlah populasi (Malaysia)
2014	5,2	5,7
2015	5,3	5,9
2016	5,3	6,2

Sumber : “Percentage Male Population above 65” World Bank.

Kesejahteraan Ekonomi

Dalam bukunya Bales menjelaskan bahwa kesejahteraan ekonomi suatu negara menjadi salah satu alasan mengapa banyaknya kasus perdagangan manusia yang terjadi dan menjadi alasan warga negara lain memungkinkan berpindah ke negara lain. Kesejahteraan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari 3 sub indikator yaitu, tingkat kematian bayi, produksi pangan, dan konsumsi energy per kapita (Bales, 2007)

- Infant Mortality Rate (Tingkat Kematian Bayi)

Dalam bukunya bales menjelaskan bahwa semakin rendahnya tingkat kematian bayi suatu negara menunjukan bahwa negara tersebut sudah mencapai kesejahteraan ekonomi. Hal ini dikarenakan dengan ekonomi yang baik maka kebutuhan dan fasilitas yang mencukupi dan menyokong pertumbuhan bayi dan para ibu. Tingkat kematian bayi di Malaysia yang dinilai lebih rendah jika dibandingkan dengan Indonesia menjadi salah satu faktor yang menarik bagi para korban untuk berpindah ke negara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari data berikut yang sudah penulis dapatkan melalui World Bank mengenai tingkat kematian bayi di Malaysia dari tahun 2014-2016,

Gambar 17. Jumlah Kematian Bayi di Malaysia dari tahun 2014-2016

Tahun	Jumlah kematian bayi / 1000 kelahiran Hidup
2014	6,8
2015	6,8
2016	6,8

Sumber : “Infant Mortality Rate” World Bank

Dapat dilihat bahwa jumlah kematian bayi di Malaysia dari tahun 2014 hingga 2016 tetap sama dan jumlah tersebut dalam angka yang lebih kecil jika melihat jumlah kematian bayi di Indonesia bersamaan pada 2014 hingga 2016. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas

dan kebutuhan bayi dan para ibu di Malaysia jauh lebih terpenuhi daripada di Indonesia, faktor ini menjadi menarik bagi para korban yang mencari kesempatan dalam mendapatkan kehidupan yang lebih layak

- Food Production (Produksi Pangan)

Tingkat produksi pangan menjadi salah satu tolak ukur dalam melihat kondisi kesejahteraan ekonomi suatu negara yang tentu saja berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan pangan warganya. Sama seperti sub indikator sebelumnya, dengan melihat tingkat produksi pangan suatu negara maka akan menunjukkan kondisi ekonomi suatu negara sehingga menjadi faktor yang menarik bagi para korban untuk ikut terlibat dalam aktivitas perdagangan manusia dari Indonesia sebagai negara penyumbang dan Malaysia sebagai negara penerima korban perdagangan manusia. Berikut merupakan tingkat produksi pangan di Malaysia dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2016,

Gambar 18. Tingkat Produksi Pangan Malaysia tahun 2014 - 2016

Tahun	Tingkat Produksi Pangan
2014	129,21
2015	129,93
2016	131,3

Sumber : "Food Production Index" World Bank

Jika dilihat dari tabel diatas, tingkat produksi pangan Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia, sehingga menurut penulis sub indikator ini tidak berperan banyak dalam menarik perhatian para korban dari negara penyumbang perdagangan manusia.

- Energy Consumption per Capita (Konsumsi Energi per Kapita)

Menurut Bales dengan tingginya ketersediaan energy suatu negara menjadi salah satu faktor dimana negara tersebut dapat dikatakan sejahtera, hal ini dikarenakan semakin tingginya pembangunan suatu negara tentu saja membutuhkan supply energy yang tinggi yang tentu saja berarti biaya yang harus dikeluarkan pun tidak sedikit. Meskipun begitu dalam bukunya Bales menjelaskan bahwa sub indikator ini bukan menjadi faktor utama namun dapat dijadikan sebagai pertimbangan kesejahteraan suatu negara. Berikut merupakan tingkat konsumsi energi per kapita Indonesia dan Malaysia.

Gambar 19. Energy Consumption per Capita Indonesia dan Malaysia tahun 2014-2016

Tahun	Energy Consumption per Capita (Indonesia)	Energy Consumption per Capita (Malaysia)
2014	0,8 MWh	4,5 MWh
2015	0,8 MWh	4,6 MWh

2016	0,9 MWh	4,7 MWh
------	---------	---------

Sumber : “Energy Consumption per Capita” International Energy Agency.

Data yang diambil dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa konsumsi energy Malaysia sangat jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsumsi energi dari Indonesia. Merujuk kembali ke buku milik Bales, hal ini menunjukkan kondisi serta kesejahteraan ekonomi Malaysia yang kuat jika disandingkan dengan Indonesia.

Kesempatan/Ketersediaan Lapangan Kerja

Indikator ini erat kaitannya dengan kesempatan bekerja, atau dapat dikatakan ketersediaan lapangan pekerjaan di negara penerima yaitu Malaysia. Dimana menurut Bales, jika ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di negara penerima lebih tinggi dibandingkan negara penyumbang maka hal ini akan menjadi faktor penarik bagi para korban dari negara penyumbang untuk ikut terlibat dalam kegiatan terlarang ini, dengan harapan akan mendapat pekerjaan sehingga dapat menunjang kehidupan yang lebih baik (Bales, 2007). Ketersediaan lapangan pekerjaan suatu negara menurut Bales dalam bukunya dapat dilihat dari jumlah populasi anak berumur dibawah 14 tahun. Ini dikarenakan anak pada umur tersebut sudah mulai menginjak umur produktif dan tidak dapat digolongkan sebagai anak-anak. Sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan suatu negara menurut Bales, salah satunya bergantung pada jumlah populasi anak yang berumur dibawah 14 tahun. Berikut merupakan data yang penulis kumpulkan terkait ketersediaan lapangan pekerjaan dilihat melalui populasi di bawah umur 14 tahun

Gambar 20. Persentase Populasi Anak berumur dibawah 14 tahun di Indonesia dan Malaysia tahun 2014-2016

Sumber : World Bank Population Ages 0-14, Indonesia and Malaysia

Data di atas menunjukkan perbedaan persentase jumlah populasi berumur 14 tahun kebawah dari Indonesia dan Malaysia dari tahun 2014 hingga 2016. Dimana data diatas menunjukkan

bahwa jumlah penduduk berumur dibawah 14 tahun di Indonesia jauh lebih banyak daripada Malaysia.

KESIMPULAN

Human trafficking menjadi salah permasalahan yang tidak hanya dihadapi satu atau dua negara saja namun permasalahan ini menjadi permasalahan internasional. Dimana perdagangan manusia menjadi sebuah kejahatan yang bersifat *Transnational Organized Crime*. Transnasional sendiri berarti meliputi banyak negara karena tidak mengenal batas-batas negara, sedangkan *Organized* berarti kejahatan ini memiliki banyak oknum terlibat yang mana tersebar di banyak negara.

Permasalahan perdagangan manusia tidak luput dari Indonesia yang menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara sebagai negara sumber korban perdagangan manusia. Indonesia yang telah menandatangani protokol Palermo di tahun 2000 kemudian ditetapkan sebagai negara yang tergolong dalam *tier 2*, dimana *tier* tersebut melihat kekuatan hukum dan peraturan Indonesia dalam menanggulangi permasalahan ini. Banyak upaya yang sudah dilakukan Indonesia mulai dari pembuatan UU no. 21 tahun 2007 yang mengatur tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan pembuatan Peraturan Presiden no. 69 tahun 2008 yang juga mengatur tentang pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta UU no. 23 tahun 2002 yang mana pada tahun 2014 UU tersebut diubah menjadi UU no. 35 tahun 2014 dimana UU tersebut mengatur tentang perlindungan anak korban *trafficking*. Namun upaya-upaya pemerintah Indonesia tersebut masih belum sepenuhnya dapat menanggulangi permasalahan ini dikarenakan peraturan-peraturan serta perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya memenuhi standarisasi yang ditetapkan dalam protokol Palermo.

Dalam lingkup Asia Tenggara, Malaysia merupakan salah satu negara yang memiliki kasus perdagangan manusia cukup tinggi dalam skala nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan Malaysia menjadi negara tujuan aktivitas perdagangan manusia dari banyak negara khususnya Indonesia. Malaysia menjadi negara tujuan dikarenakan letak geografis Malaysia yang berdekatan dengan Indonesia, hal ini memudahkan para oknum untuk melakukan aktivitas perdagangan manusia. Tingkat kemiskinan di Malaysia jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Indonesia, hal ini dapat dilihat dari tingkat kematian bayi yang rendah, tingginya produksi pangan guna memenuhi kebutuhan warga negara Malaysia, dan banyaknya kesempatan untuk bekerja. Meskipun banyak terjadi kasus perdagangan manusia, Malaysia telah melakukan banyak upaya guna mengurangi aktivitas tersebut mulai dari peratifikasian protokol Palermo pada tahun 2009, Malaysia ikut tergabung sebagai anggota Bali Process, Malaysia juga melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam Join Police Force dalam menghadapi permasalahan tersebut. Setelah meratifikasi protokol Palermo Malaysia ditetapkan sebagai negara yang digolongkan sebagai *tier 2 watchlist*, dimana Malaysia dinilai sudah memiliki undang-undang serta peraturan guna mengatasi perdagangan manusia namun belum memenuhi standarisasi yang sudah ditetapkan dalam protokol Palermo. Jumlah kasus perdagangan manusia yang tinggi juga menjadi salah satu faktor mengapa Malaysia digolongkan sebagai *tier 2 watchlist*.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa peningkatan jumlah kasus perdagangan manusia di Malaysia dari Indonesia tidak hanya dikarenakan kondisi domestik Indonesia seperti kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja, tingkat kematian bayi yang tinggi, tingkat korupsi pemerintah Indonesia. Namun terdapat faktor eksternal selain dari yang sudah disebutkan diatas, faktor eksternal ini penulis dapatkan melalui hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan korban-korban perdagangan

manusia. Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan beberapa poin-poin yang sekaligus menjadi faktor eksternal meningkatnya jumlah kasus perdagangan manusia, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan permasalahan ekonomi, sehingga faktor-faktor pendorong yang dijelaskan dalam teori milik Kevin Bales terlalu universal sedangkan menurut hasil yang ditemukan penulis terdapat faktor-faktor lain yang juga menjadi pemicu terjadinya perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bales, K. (2007). What Predicts Human Trafficking? *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 31(2), 269-279.
doi:<https://doi.org/10.1080/01924036.2007.9678771>
- BPS. (2019, Juli 15). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen*. Diambil kembali dari [bps.go.id](https://www.bps.go.id):
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-%20penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>
- Capobianco, P. (2013). Theory of Human Trafficking Applied to the Case of Japan. Diambil kembali dari <https://virginiareviewofasianstudies.com/wp-content/uploads/2013/06/7>
- Daniel, E. M. (2017). Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur. *Social Work Jurnal*, 7(1), 1-129. doi: <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13808>
- detikNews. (2011, Juli 7). *Tak Ada Sejarahnya Koruptor yang Kabur ke Luar Negeri Bisa Ditangkap*. Diambil kembali dari detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-1676354/tak-ada-sejarahnya-koruptor-yang-kabur-ke-luar-negeri-bisa-ditangkap>
- Dewi, S. (2020, Maret 3). *Kondisi Korupsi di Indonesia Ironis, KPK Maunya Gelar OTT Tiap Hari*. Diambil kembali dari IDN TIMES:
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kpk-mau-gelar-ott-setiap-hari-kondisi-korupsi-ironis/5>
- Faqih, M. (2014, Desember 31). *Konflik TNI-Polri Paling Tinggi pada 2014*. Diambil kembali dari REPUBLIKA.co.id:
<https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/12/31/nhfljx-konflik-tnipolri-paling-tinggi-di-2014>
- Felisiani, T. (2014, Mei 19). *Tawuran Pelajar di Senen, Siswa SMK 1 Budi Utomo Tewas Dibacok*. Diambil kembali dari Tribunnews.com:
<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/05/19/tawuran-pelajar-di-senen-siswa-smk-1-budi-utomo-tewas-dibacok>
- Harris, O. (2017). *Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur*. Diambil kembali dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur:
<http://kbrikuualumpur.org/w/2017/02/25/country-profile-malaysia/>
- IñakiArto. (2016, Agustus). Energy for Sustainable Development. 33(5), 1-13.
doi:<https://doi.org/10.1016/j.esd.2016.04.001>
- International Investments. (t.thn.). *Penduduk Indonesia*. Dipetik Maret 3, 2020, dari INDONESIA INVESTMENTS: <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67?>
- Jakarta Post, T. (2017, Mei 7). *Indonesian police bust human trafficking syndicate*. Dipetik September 30, 2020, dari The Jakarta Post:
<https://www.thejakartapost.com/news/2017/05/07/indonesian-police-bust-human-trafficking-syndicate.html>
- Julianto, P. A. (2017, Februari 19). *Negara Agraris, Mengapa Harga Pangan di Indonesia Rawan*

- Bergejolak?* Diambil kembali dari KOMPAS.com:
<https://money.kompas.com/read/2017/02/19/163912926/negara.agraris.mengapa.harga>
- kumparan. (2018, Maret 28). *angka Kematian Ibu dan Bayi Indonesia Tertinggi Kedua di Asia Tenggara*. Diambil kembali dari kumparanSains:
<https://kumparan.com/kumparansains/angka-kematian-ibu-dan-bayi-indonesia-tertinggi-kedua-di-asia-tenggara>
- Kusmiyati. (2013, September 10). *Jangan Hamil di Usia Kurang 20 Tahun, Bahaya! Kenali Risikonya!* Diambil kembali dari liputan6.com:
<https://www.liputan6.com/health/read/688443/jangan-hamil-di-usia-kurang-20-tahun-bahaya-kenali-risikonya>
- Kusnandar, V. B. (2019, September 19). *Inilah Luas Dan Letak Daerah 34 Provinsi Indonesia," Databoks, accessed March*. Dipetik Maret 3, 2020, dari databoks:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/19/inilah-luas-dan-letak-daerah-34-provinsi-Indonesia>
- Kusuma, H. (2017, Agustus 3). *Ini Sederet Pangan yang Diimpor RI*. Diambil kembali dari detikfinance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3584236/ini-sederet-pangan-yang-diimpor-ri>
- M. Melrose, J. (2013). *Critical Perspectives on Child Sexual Exploitation and Related Trafficking* (1 ed.). Palgrave Macmillan UK. doi:10.1057/9781137294104
- Malau, B. S. (2015, Oktober 13). *4 Pelajar Tewas Karena Tawuran di Depok*. Diambil kembali dari WARTAKOTAAlive.com: <https://wartakota.tribunnews.com/2015/10/13/4-pelajar-tewas-karena-tawuran-di-depok>
- Mehlman-Orozco, K. (2014, Mei 20). HUMAN TRAFFICKING IN THE PHILIPPINES: A BLEMISH ON ECONOMIC GROWTH. Dipetik Maret 10, 2020, dari <https://www.diplomaticourier.com/posts/human-trafficking-in-the-philippines-a-blemish-on-economic-growth>
- Naibaho, N. (2011, Januari-April). HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA: LAW ENFORCEMENT PROBLEMS. *INDONESIA Law Review*, 1(1), 83-99.
doi:<http://dx.doi.org/10.15742/ilrev.v1n1.48>
- OECDiLibrary. (2012). *Global Report on Trafficking in Persons 2012*.
doi:<https://doi.org/10.18356/0f12c65d-en>
- Prawira, A. E. (2014, April 21). *5 Langkah Kemkes Turunkan Angka Kematian Ibu dan Anak*. Diambil kembali dari liputan6.com:
<https://www.liputan6.com/health/read/2039834/5-langkah-kemkes-turunkan-angka-kematian-ibu-dan-anak>
- Process, B. (2019). *About The Bali Process*. the Governments of Japan, New Zealand and Australia. Diambil kembali dari <https://www.baliprocess.net/>
- Rahmat, P. S. (2009, Juni). Penelitian Kualitatif. *EQUILIBRIUM*, 1-8. Diambil kembali dari <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>
- Rostanti, Q. (2017, Agustus 8). *Ini Penyebab Semakin Maraknya Perdagangan Orang*. Dipetik Januari 11, 2020, dari REPUBLIKA.co.id:
<https://www.republika.co.id/berita/oudchr425/ini-penyebab-semakin-maraknya-perdagangan-orang>
- Saifullah, M. (2014, Januari 2). *Waspada, Konflik Sosial Sudah Telan 203 Nyawa*. Diambil kembali dari okenews:
<https://news.okezone.com/read/2014/01/02/339/920558/waspada-konflik-sosial-sudah-telan-203-nyawa>
- Sembiring, E. K. (2015, Agustus 20). *Mengingat Kembali Kelahiran KPK*. Diambil kembali dari

- SINDONEWS.com:
<https://nasional.sindonews.com/berita/1034861/19/mengingat-kembali-kelahiran-kpk>
- State, U. D. (2017). *Country Narratives: Countries G Through M*. Dipetik Maret 10, 2020, dari <https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm>.
- Suryanto. (2009, Februari 25). *Pertemuan "Bali Process" Disepakati 14-15 April*. Dipetik September 30, 2020, dari ANTARA.NEWS.com: Pertemuan "Bali Process" Disepakati 14-15 April
- Transparency International. (t.thn.). *CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX- 2014*. Dipetik Maret 3, 2020, dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2014/index/dnk>
- Transparency International. (t.thn.). *CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2015*. Dipetik Maret 3, 2020, dari <https://www.transparency.org/en/publications/cpi-2015>
- Transparency International. (t.thn.). *CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2016*. Dipetik Maret 3, 2020, dari <https://www.transparency.org/en/news/corruption-perceptions-index-2016>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2017, Januari). *Global Report on Trafficking in Persons 2016, pp 315-350*. Diambil kembali dari UN-Library: <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210584081>
- United Nations Treaty Collection. (t.thn.). UN, United Nations, UN Treaties, Treaties. Dipetik September 30, 2019, dari https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-14&chapter=18&clang=_en
- Wiwoho, L. H. (2015, Januari 28). *Korupsi, dari Kerajaan Nusantara hingga Reformasi*. Diambil kembali dari KOMPAS.com: <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi.dari.Kerajaan.Nusantara.hingga.Reformasi?page=all>
- World Bank, T. (t.thn.). *Food production index (2004-2006 = 100)*. Dipetik Maret 3, 2020, dari <https://data.worldbank.org/indicator/AG.PRD.FOOD.XD>
- World Bank, T. (t.thn.). *Mortality rate, infant (per 1,000 live births) - Indonesia*. Dipetik Februari 20, 2020, dari <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN?locations=ID>
- World Bank, T. (t.thn.). *Population growth (annual %) - Indonesia*. Dipetik Maret 3, 2020, dari <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW>
- Yuana, L. (2018, November 16). *USAID Identifikasi Penyebab Tingginya Angka Kematian Bayi di Jatim*. Dipetik Februari 18, 2020, dari TIMES INDONESIA: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/189939/usa-identifikasi-penyebab-tingginya-angka-kematian-bayi-di-jatim>